

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 8

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 9

1.4. Kegunaan Penelitian 10

1.5. Kerangka Pemikiran 13

1.6. Metode Penelitian 19

1.7. Lokasi Penelitian 25

1.8. Sistematika Penulisan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 27

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum 27

2.1.2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum 33

2.1.3. Teori Efektivitas Hukum 42

2.2. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia 49

2.2.1. Pengertian Kepolisian 49

2.2.2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian 53

2.2.3. Fungsi Kepolisian Lalu Lintas	56
2.3. Tinjauan Umum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	60
2.3.1. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	60
2.3.2. Asas Dan Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	63
2.3.3. Hak Dan Kewajiban Pengguna Jalan	66
2.4. Tinjauan Umum Patroli Dan Pengawasan	69
2.4.1. Pengertian Patroli	69
2.4.2. Pengertian Pengawasan	72
2.4.3. Dasar Hukum Pelaksanaan Patroli Dan Pengawasan ..	74
2.4.4. Prosedur Pelaksanaan Patroli Dan Pengawasan	77
2.5. Prioritas Penggunaan Jalan Menurut Pasal 134 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	79
2.5.1. Pengertian Pengguna Jalan Yang Memperoleh Hak Utama	79
2.5.2. Jenis Kendaraan Yang Mendapat Prioritas	82
2.5.3. Analisis Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	85
2.6. Teori Kewenangan	88
2.6.1. Pengertian Kewenangan	88
2.6.2. Sumber Kewenangan	91

2.6.3. Kewenangan Kepolisian Dalam Patroli Dan Pengawasan	94
2.7. Penelitian Terdahulu	97

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	104
3.1.1. Kasus Posisi Pelaksanaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Berdasarkan Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	104
3.1.2. Pelaksanaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Berdasarkan Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	109
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Berdasarkan Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	116
3.1.4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Berdasarkan Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah	
Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	124
3.2. Pembahasan	131
3.2.1. Pelaksanaan Patroli Dan Pengawalan (Patwal)	
Berdasarkan Pasal 134 Huruf g Undang-Undang	
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan	
Angkutan Jalan Di Wilayah Kepolisian Resor	
Tasikmalaya Kota	131
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Patroli	
Dan Pengawalan (Patwal) Berdasarkan Pasal 134	
Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah	
Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	139
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Patroli	
Dan Pengawalan (Patwal) Berdasarkan Pasal 134	
Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah	
Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	148

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	157
4.2. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN